

**ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN SEBAGAI LAHAN TEBU OLEH
PT KEBUN TEBU MAS TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
BANGGLE KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN”**

PASIYANI NINGRUM

Email : pasiyaningrum73@gmail.com

Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang

Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah alih fungsi lahan hutan sebagai lahan tebu dilihat dari sisi pendapatan, lapangan kerja dan kondisi sosial ekonomi petani penggarap lahan hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah, kepala desa, ketua LMDH (lembaga Masyarakat Desa hutan) dan pihak perum perhutani. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Penulis memaparkan secara apa adanya hasil dari lapangan dengan melihat validitas datanya dan dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data kemudian kesimpulan. Hasil penelitian menjabarkan bahwa proses alih fungsi lahan hutan sebagai lahan tebu yang terjadi di Desa Banggle memberikan dampak yang berbeda bagi perekonomian petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah, dilihat dari sisi pendapatan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu membawa dampak yang kurang baik bagi penghasilan petani penggarap lahan hutan. Dimana pendapatan yang diterima sebelum adanya alih fungsi lahan hutan diatas Rp 8.000.000 pertahunnya untuk hasil padi dan hasil jagung. Setelah adanya alih fungsi lahan hutan pendapatan yang diterima menurun baik dari hasil padi maupun hasil panen jagung yang rata-rata dibawah Rp 8.000.000 pertahunnya. Dilihat dari sisi lapangan kerja ada sebuah perubahan mata pencaharian, bagi petani penggarap lahan hutan yang memiliki lahan sawah sendiri tetap bertahan sebagai petani, bagi petani yang tidak memiliki lahan sawah sendiri ada yang tetap bekerja jadi petani di lahan hutan, ada yang berjualan, ada yang jadi buruh bangunan, ada yang jadi pekerja di lahan tebu dan menjadi peternak. Dilihat dari sisi sosial ekonominya sama bagi petani penggarap lahan hutan yang memiliki lahan sawah sendiri maka kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan tetaplah baik sedangkan untuk penggarap lahan hutan yang tidak memiliki lahan sawah sendiri sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan hutan sebagai lahan sawah berubah. Sebelumnya petani penggarap bisa memenuhi segala kebutuhan baik itu pendidikan dan sebagainya. Akan tetapi setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu petani penggarap harus memikirkan mana kebutuhan yang lebih penting walaupun bisa menyekolahkan anaknya tapi harus berhemat tidak seperti dulu.

Kata Kunci : Dampak Alih Fungsi , Lahan Hutan sebagai Lahan Tebu, Perekonomian Masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Lahan diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, perhutanan, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Lahan juga merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan.

Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia khususnya di pulau Jawa kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan. Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Lahan berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas manusia terhadap lahan yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. Sehingga dengan demikian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara

memanfaatkan lahan dengan cara mengolahnya semaksimal mungkin.

Dalam bidang kehutanan lahan merupakan sumberdaya yang penting. Hutan merupakan salah satu pusat keanekaragaman jenis tumbuhan yang didominasi oleh pepohonan dan tumbuhan berkayu. Selain itu secara tidak langsung hutan juga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi sumber pangan. Hutan tidak hanya dijadikan sebagai lahan untuk menanam berbagai cocok tanaman yang berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan. Akan tetapi lahan hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau lahan sawah yang dapat ditanami beberapa komoditi seperti padi, kacang tanah, jagung dan aneka buah-buahan. Lahan hutan tersebut dapat dimanfaatkan seefisien mungkin agar lahan hutan tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat dapat menikmati hasil dalam pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian atau sawah.

Meskipun demikian kini banyak lahan hutan yang telah dibuka menjadi lahan pertanian atau sawah, akan tetapi permasalahan yang sekarang terjadi adalah tentang pengalih fungsi lahan (Konversi). Alih fungsi lahan pada hakikatnya

merupakan hal yang wajar terjadi pada era modern seperti sekarang ini. Terbatasnya ketersediaan lahan telah menjadi kendala dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing sektor pembangunan. Walaupun kriteria lahan yang diperlukan untuk setiap sektor berbeda, namun pada kenyataannya masih sering terjadi benturan kepentingan dan alih fungsi lahan (Utomo, 1992 dalam Anandhio 2017).

Alih fungsi lahan atau yang lazim disebut konversi lahan adalah perubahan (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Banyaknya akan kebutuhan membuat semua orang mengupayakan tentang alih fungsi lahan. Dimana alih fungsi lahan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja baik petani maupun orang lain. Alih fungsi lahan tersebut dilakukan dengan banyak alasan salah satunya yaitu harga lahan yang mahal membuat orang tertarik untuk menjual lahannya.

Desa Banggle kecamatan Sukorame kabupaten Lamongan merupakan sebuah desa yang jauh dari kota dimana mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani. Desa Banggle dikelilingi dengan hutan yang dilindungi oleh pihak perum perhutani

seluas 200 hektar. Masyarakat desa Banggle memanfaatkan hutan yang luas tersebut hanya sebagai tempat untuk mencari kayu bakar untuk memasak. Di Desa Banggle bekerja sebagai petani sudah biasa, sehingga masyarakat desa Banggle hanya menghabiskan waktunya untuk mengelola sawah yang dimilikinya untuk bercocok tanam. Dengan mengelola lahan sawah yang asli dimilikinya membuat perekonomian yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Petani yang ada di Desa Banggle ini terdiri dari dua golongan yaitu sebagai petani pemilik dan petani penggarap.

Seiring dengan kebutuhan manusia yang meningkat dan keinginan untuk memiliki lahan yang luas. Sehingga sekitar 20 tahunan pihak perum perhutani melakukan pembukaan lahan hutan. Pembukaan lahan tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian oleh pihak perhutani untuk masyarakat Desa Banggle. Sebelum dijadikan lahan sawah antara pihak perum perhutani dengan masyarakat melakukan sebuah kerjasama dimana kerjasama tersebut yaitu masyarakat harus membayar *sharing* atau membayar semacam pajak yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Masyarakat Desa Banggle yang ikut menggarap lahan hutan menjadi sawah tersebut dinaungi oleh sebuah organisasi yaitu LMDH (lembaga masyarakat desa

hutan). LMDH merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pihak Perum Perhutani yang dimana anggotanya adalah masyarakat sekitar hutan tersebut yaitu masyarakat Desa Banggle. Organisasi LMDH tersebut dahulu diketua oleh bapak Parto dan sekarang diketuai oleh bapak Poniman, dengan jumlah anggota 80 orang penggarap lahan hutan sebagai lahan pertanian atau sawah.

Pembukaan lahan hutan sebagai pertanian (sawah) tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Banggle. Dimana dengan adanya lahan hutan menjadi sawah pendapatan masyarakat Desa Banggle cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kesempatan masyarakat desa Banggle untuk bekerja menjadi meningkat. Yang awalnya hanya bekerja penggarap sawah orang, sekarang masyarakat Desa Banggle yang memiliki sawah tidak luas bisa bekerja dilahan hutan yang dijadikan sawah tersebut. Serta semaksimal mungkin menggarap sawah dari lahan hutan tersebut untuk menghasilkan hasil panen padi, jagung, dan buah-buahan menjadi hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Banggle.

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern, tidak hanya dikota besar alih fungsi lahan terjadi. Pada akhir 2018

merupakan pertama kalinya bagi Desa Banggle terjadi sebuah konversi lahan (alih fungsi lahan) dimana alih fungsi lahan tersebut dilakukan oleh pihak perhutani. Dimana pihak perum perhutani yang telah dapat persetujuan dari ketua LMDH melakukan sebuah alih fungsi lahan. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota pihak LMDH yaitu Bapak Jamianto Sekitar 100 hektar lebih Lahan hutan yang dijadikan sebuah sawah oleh masyarakat Desa Banggle di alih fungsikan oleh perum perhutani menjadi lahan tebu. Dimana lahan tebu tersebut dikuasi oleh PT Kebun Tebu Mas dari Ngimbang. Sekitar 24 hektar luas lahan hutan tersisa yang tidak dialih fungsikan sebagai lahan tebu dibagi rata kepada anggota masyarakat Desa Banggle yang ikut menggarap lahan hutan menjadi Sawah.

Pengalihan fungsi lahan atau konservasi yang dilakukan membawa dampak dalam perekonomian masyarakat desa banggle. Karena lahan hutan yang dijadikan sawah menyempit sehingga perolehan hasil panen, pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak sama seperti dulu sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu dan kesempatan kerja semakin menurun bagi pihak penggarap lahan hutan karena sawah yang digarap tidak seperti dulu. Perubahan alih fungsi lahan dari

lahan hutan yang dijadikan sawah ke lahan tebu yang dikuasai oleh PT Kebun Tebu Mas menghilangkan kesempatan dalam memproduksi padi dan komoditas pertanian lainnya, namun juga hilangnya lahan sawah yang ada, baik masyarakat desa yang memiliki sawah asli luas maupun masyarakat yang mempunyai sawah asli kurang luas. Berdasarkan pertimbangan pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan sebagai Lahan Tebu Oleh PT Kebun Tebu Mas terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan”**.

KAJIAN PUSTAKA

a. Definisi Alih Fungsi Lahan (Konversi Lahan)

Lahan pertanian yang biasanya dialih fungsikan oleh petani adalah lahan sawah yang subur tempat mereka menggantungkan hidupnya. Lahan sawah tersebut berfungsi sebagai produk pertanian khususnya bahan pangan. Ketika petani melakukan alih fungsi lahan sawah miliknya maka mata pencaharian mereka akan berubah dan ketersediaan bahan pangan pun akan terancam. Alih

fungsi lahan pertanian menjadi perhatian utama karena didasarkan pada upaya untuk membatasi pertumbuhan fisik dan kota dalam rangka mempertahankan kualitas hidup, baik secara lingkungan maupun sosial Kivell dalam Sulistyawati (2014).

Menurut Lestari dalam Kristianto (2015) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Menurut Dahuri dalam Wijaya dan Made (2015) mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi.

Menurut Bambang dalam Firdaus (2018), konversi lahan pada dasarnya disebabkan karena persaingan pemanfaatan antara penggunaan lahan pertanian dengan non pertanian. Hal itu disebabkan karena adanya fenomena ekonomi dan sosial yaitu: keterbatasan sumber daya lahan, pertumbuhan

penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan penduduk memicu tingginya kelangkaan lahan kemudian akibat adanya pertumbuhan ekonomi maka penggunaan lahan untuk kegiatan non pertanian semakin meningkat, pada akhirnya semua itu menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Dapat disimpulkan konversi lahan merupakan perubahan kepemilikan lahan atau perubahan bentuk dan fungsi dari penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang prosesnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

b. Dampak Konversi Lahan

Menurut Soemarno dalam Laksmana (2015) konversi lahan berimplikasi pada perubahan struktur agraria, beberapa perubahan yang terjadi, yaitu:

1. Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah.
2. Perubahan pola penggunaan. Pola penggunaan tanah dapat dilihat dari

bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan memengaruhi berkurangnya kesempatan kerja disektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang semakin tinggi. Implikasi dari berlangsungnya perubahan ini adalah dimanfaatkannya lahan tanpa mengenal sistem “bera”, khususnya untuk lahan sawah.

3. Perubahan pola hubungan agraria. Lahan yang makin terbatas menyebabkan mudarnya sistem bagi hasil tanah “maro” menjadi “mertelu”. Demikian juga munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai lahan dan makin terbatasnya lahan.

4. Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non-pertanian. Keterbatasan lahan dan masalah ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.
5. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan dapat menyebabkan pendapatan yang semakin menurun.

Menurut Widjanarko dalam Sulistyawati (2014) alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian. Menurut Ruswandi et al

dalam Sulistyawati (2014) secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

c. Dampak Alih Fungsi terhadap Perekonomian Masyarakat

Dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik bersifat negatif maupun positif. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb. Serta bisa juga diartikan sebagai tata kehidupan perekonomian. Dalam setiap kegiatan pembangunan yang menyebabkan konversi lahan pertanian memang selalu membawa dampak, baik itu positif maupun negatif yang berakibat pada tata kehidupan perekonomian seseorang maupun keluarga. Maksud dalam dampak perekonomian disini ialah akibat dari kegiatan konversi lahan baik itu bersifat baik atau buruk terhadap tata kehidupan perekonomian petani yang dilihat dari

keuangan (pendapatan), lapangan kerja (kesempatan kerja) dan sosial ekonomi.

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian keluarga. Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikasi sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat di samping pekerjaan, kekayaan dan pendidikan. Keputusan seseorang dalam memilih pekerjaan dipengaruhi oleh sumberdaya dan kemampuan dalam diri individu. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno dalam Lumintang (2013) pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan

usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan yaitu dari sektor pertanian dan non pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani, usaha peternakan dan buruh tani, sedangkan dari non pertanian berasal dari usaha dagang, jasa, pegawai, buruh non pertanian dan pekerjaan lainnya di luar pertanian. Valeriana dalam Kamilah (2012), ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu penguasaan lahan, pemakaian benih berlabel dan penggunaan pupuk yang berimbang. Penguasaan lahan terdiri dari hak milik dan kepunyaan orang lain. Bagi petani yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan sempit, bisa diatasi dengan cara menyewa, menyakap atau menggadai. Besarnya penguasaan lahan akan berdampak langsung ke pendapatan usaha tani, dengan menguasai lahan yang besar tentunya akan memperoleh pendapatan yang besar.

Pendapatan petani adalah pendapatan rumah tangga sebagai hasil usahatani ditambah dengan penerimaan rumah tangga seperti upah tenaga kerja yang diperoleh dari luar usahatani. Berdasarkan sumbernya pendapatan petani dipedesaan bukan hanya berasal dari sektor pertanian tetapi juga berasal dari luar sektor pertanian. Pendapatan di luar sektor pertanian dapat dibagi dua yaitu pendapatan dari usaha dengan menggunakan modal sendiri seperti berdagang, investasi dan menyewakan lahan, sedangkan pendapatan usaha tanpa modal berupa hasil sebagai buruh pertanian, pegawai dan jasa (Soekartawi, 2003) dalam Kamilah (2018).

2. Lapangan Kerja (kesempatan Kerja)

Lapangan pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha dimana seseorang itu bekerja. Menurut Bakir dalam Pengertian Kesempatan Kerja Yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan kesempatan kerja sebagai lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (penggunaan tenaga kerja). Dapat juga diartikan bahwa

kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang bekerja pada suatu lapangan pekerjaan atau dengan kata lain sama dengan jumlah orang yang terserap pada berbagai sektor ekonomi .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 menjelaskan bahwa kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Haryani dalam Hidayani dan Kartikasari (2016) mengungkapkan kesempatan kerja ditunjukkan dengan jumlah orang yang bekerja pada suatu saat dan berubah setiap waktu. Kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan dapat diisi oleh pencari kerja

3. Sosial Ekonomi Masyarakat

Sosial ekonomi merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan terhadap jenis aktivitas ekonomi, pendidikan dan pendapatan. sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa kondisi

sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi. Hal ini ditentukan oleh banyak hal yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Pada masyarakat aspek sosial ekonomi terpengaruhi oleh lingkungan dimana masyarakat tinggal, aspek sosial ekonomi ini menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat, jenis pekerjaan yang di geluti, aspek interaksi pada pemukiman antara individu maupun kelompok dalam peningkatan kesejahteraan. Selain itu Faktor sosial ekonomi adalah faktor-faktor yang berasal dari segi sosial dan ekonomi yang dimiliki petani sehingga dapat mempengaruhi mereka mengenai suatu hal. Petani adalah semua orang yang berdiam di pedesaan yang mengelola usaha pertanian Karakteristik sosial ekonomi petani Menurut Hartanto dalam Ante (2016):

- a. Umur. Umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan respon terhadap hal-

hal yang baru dalam menjalankan usaha taninya.

- b. Tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam,
- c. Pendapatan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian keluarga. Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikasi sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat di samping pekerjaan, kekayaan dan pendidikan. Keputusan seseorang dalam memilih pekerjaan dipengaruhi oleh sumberdaya dan kemampuan dalam diri individu.

METODE

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Desa Banggle Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan desain analisis dari Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai September 2019. Subjek penelitian yang

berhasil diwawancarai sebanyak 15 petani penggarap lahan hutan sebagai sawah, pihak perum perhutani, ketua organisasi LMDH (Lembaga masyarakat Desa Hutan) dan aparat desa yaitu Kepala Desa. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Data yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis selama di lapangan dan setelah penelitian berakhir. Data dianalisis dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, menyaring/reduksi data, penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pembukaan Lahan Hutan Menjadi Lahan Sawah

Lahan hutan merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Lahan hutan pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk ditanami berbagai jenis pohon yang dapat menjaga kelestarian hutan dan tanaman produksi untuk sumber penghasilan perum perhutani. Semua Lahan hutan diseluruh indonesia pasti memiliki penjaga atau pengelola agar pohon-pohon yang ditanam tidak dicuri oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan hutan yaitu Pihak perum perhutani. Selain itu lahan hutan yang ada di desa Banggle awalnya hanya dijadikan

sebagai tempat mencari kayu bakar dan mengembara binatang ternak.

Namun seiring dengan waktu lahan hutan sekitar masyarakat desa Banggle yang awalnya dimanfaatkan untuk hutan produksi dan menjaga tanah pada tahun 2004 lahan hutan bisa dirubah menjadi lahan sawah yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan yaitu masyarakat dusun banggle sebagai lahan pertanian. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah di dusun banggle dilakukan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Pembukaan lahan hutan menjadi sawah tersebut merupakan program daerah yang dilakukan oleh pihak perum perhutani yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat desa khususnya masyarakat dusun Banggle. Luas lahan hutan yang ada di dusun banggle kurang lebih 1000 ha. Tidak semua luas lahan hutan tersebut dibuka oleh pihak perum perhutani menjadi sawah melainkan sekitar 290 ha. Pembukaan lahan hutan menjadi sawah yang dilakukan pihak perum perhutani di sambut baik oleh masyarakat desa banggle. Dimana tidak semua masyarakat desa banggle yang berprofesi sebagai petani memiliki sawah sendiri, dimana petani di desa banggle ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu petani pemilik dan petani penggarap.

Dengan adanya pembukaan lahan hutan menjadi sawah sangat bermanfaat bagi petani yang tidak memiliki sawah, yang memiliki sawah sempit maupun memiliki luas sawah yang luas, karena hal tersebut mampu menjadi tambahan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dusun banggle. Lahan hutan yang dibuka menjadi lahan sawah dimanfaatkan oleh Masyarakat desa Banggle untuk menanam berbagai tanaman, ketika musim hujan (rendeng) tiba maka lahan hutan yang digarap menjadi sawah banyak ditanami padi. Pada saat musim kemarau lahan hutan yang digarap menjadi sawah kebanyakan ditanami komoditi jagung oleh petani penggarap lahan.

Pembukaan lahan hutan tersebut tidak dibuka begitu saja oleh pihak perum perhutani dimana apabila masyarakat dusun banggle yang ingin melakukan penggarapan lahan hutan menjadi sawah tiap satu tahun sehabis masa panen harus membayar shering. Shering yang dimaksud dalam hal ini adalah membayar semacam pajak. Tujuan pembayaran shering tersebut adalah untuk membantu pihak perum perhutani dalam membayar pajak kehutanan yang sebesar Rp 40.000.000 satu tahunnya sejawat timur.

Mekanisme pembayaran pajak tersebut sesuai dengan luas lahan yang masyarakat

dusun banggle garap, apabila luas lahan hutan yang digarap menjadi sawah luas maka pembayaran sheringnya sekitar Rp 400.000 lebih namun apabila lahan hutan yang digarap menjadi sawah kurang luas maka pembayaran shering sekitar Rp 200.000. Pembayaran shering ini diserahkan kepada organisasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa HUTan) oleh pihak perum perhutani dimana organisasi LMDH ini dibentuk oleh pihak perhutani. Organisasi LMDH ini bernama kelompok bina humas, yang dimana organisasi LMDH ini bertugas untuk melindungi, menerima aspirasi petani peggarap lahan hutan menjadi lahan sawah dan penyetor uang shering untuk diserahkan kepada pihak perum perhutani. Organisasi LMDH ini awalnya diketuai oleh Bapak Parto (Alm) dan setelah itu diganti oleh Bapak Poniman. Anggota organisasi LMDH ini sejumlah 80 peggarap lahan hutan menjadi lahan sawah. Syarat apabila ingin menjadi petani peggarap lahan hutan menjadi lahan sawah adalah harus menyetorkan foto copy KK (kartu keluarga) dan foto copy KTP (kartu tanda penduduk).

2. Gambaran Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Tebu di Desa Banggle

Alih fungsi lahan merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi ditelinga kita di era

modern seperti saat ini. tidak hanya dikota besar alih fungsi lahan terjadi namun sekarang sudah sampai di pedesaan. Alih fungsi lahan biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi yang mempunyai uang banyak. Desa banggle ini merupakan sebuah desa yang jauh dari kota. Desa banggle juga merupakan sebuah desa yang dikelilingi begitu luas lahan hutan. Lahan hutan yang begitu luas menjadikan masyarakatnya sangat bergantung sekali pada lahan hutan tersebut. Sehingga ketika ada pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah sangat membuat hati masyarakat gembira, karena mereka memiliki garapan lahan yang bisa dijadikan sawah untuk menopang kehidupan masyarakat tersebut. Lahan hutan yang dibuka mejadi lahan sawah berjalan sangat lama sehingga masyarakat menggantungkan kehidupan di lahan hutan tersebut.

Namun akhir tahun 2018 lalu kegembiraan yang dirasakan oleh petani penggarap lahan hutan tersebut suram. Dimana lahan hutan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari di alih fungsikan menjadi lahan tebu yang dikuasai oleh PT Kebun Tebu Mas dari kecamatan Ngimbang. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu tersebut membutuhkan proses yang begitu panjang karena pihak perum perhutani harus memiliki

persetujuan dengan petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah. Namun pada akhirnya para petani penggarap lahan hutan tersebut memperbolehkan adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu asalkan alih fungsi lahan tersebut tidak berjalan lama.

Alasan yang mendasari pihak perum perhutani melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu ialah pihak perum perhutani merasa dirugikan oleh petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah. Yang dimana sebenarnya pembayaran shering atau pajak yang dikenakan oleh masyarakat 1 hektar lahan hutan yang digarap menjadi sawah harus membayar Rp 1.000.000, akan tetapi masyarakat tidak mau membayar pajak sesuai dengan UU yang telah ditentukan. Alasan yang lain pasokan gula yang terbatas di indonesia sehingga harus mencari lahan dijadikan tempat untuk menanam bahan baku, itu lah yang membuat pihak perum perhutani setuju melakukan kerja sama dengan PT Kebun Tebu Mas. Hal tersebut juga dinyatakan oleh ketua LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) ketika ketua organisasi mengikuti seminar bahwa pasokan gula kurang sehingga harus mencari tempat sebagai pemasok bahan baku gula.

Ketika Pihak perum perhutani bekerjasama dengan PT Kebun Tebu Mas tersebut,

melakukan sebuah perjanjian selain membayar sewa lahan hutan milik perum perhutani. Pihak PT juga akan memberikan bagian 2% hasil dari tebu kepada pihak perum perhutani. Kerana hal tersebut pihak perum perhutani melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu, Karena pihak perum perhutani memiliki sebuah tanggungan yang begitu besar untuk membayar karyawan atau mador, tidak hanya itu setiap tahunnya pihak perum perhutani harus membayar pajak hutan Rp 40.000.000 pertahunnya dan sejawa timur perum perhutani harus membayar Rp 1.000.000.000. oleh karena itu pihak perhutani mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan PT Kebun Tebu Mas. Selain mengalihkan lahan hutan menjadi lahan tebu, akan tetapi petani penggarap lahan hutan menjadi sawah masih diberikan garapan oleh pihak perum perhutani. Meskipun sekarang harus bekerja dilahan yang berkurang.

3. Pembahasan

a. Pendapatan Masyarakat Desa Banggle sebelum dan sesudah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Lahan merupakan faktor produksi utama dalam pertanian dimana berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi

para petani. Di era yang modern ini tidak asing lagi yang namanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang terjadi di Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. hal ini tentu saja akan membawa dampak pada pendapatan petani penggarap lahan hutan yang awalnya jadi sawah ber alih fungsi menjadi lahan tebu. Karena secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan luasan lahan. Berikut adalah tabel tentang penjabaran pendapatan petani penggarap lahan hutan sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu dan setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Tabel 4.8 Pendapatan Informan Dalam Rupiah (Rp) sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu

No	Subjek	Luas lahan sebelum di alih fungsikan	Jumlah pendapatan hasil panen padi	jumlah pendapatan hasil panen jagung
1	1	0,67 Ha	Rp 10.000.000	Rp 9.000.000
2	2	0,56 Ha	Rp 15.000.000	Rp 9.000.000
3	3	0,56 Ha	Rp 14.000.000	Rp 9.000.000
4	4	0,56 Ha	Rp 15.000.000	Rp 9.000.000
5	5	0,56 Ha	Rp 13.000.000	Rp 9.000.000
6	6	0,56 Ha	Rp 14.000.000	Rp 9.000.000
7	7	0,56 Ha	Rp 12.700.000	Rp 7.300.000
8	8	0,56 Ha	Rp 13.000.000	Rp 7.200.000

9	9	0,56 Ha	Rp 12.000.000	Rp 9.000.000
10	10	0,56 Ha	Rp 13.500.000	Rp 8.900.000
11	11	0,56 Ha	Rp 13.500.000	Rp 5.600.00
12	12	0,56 Ha	Rp 13.000.000	Rp 9.000.000
13	13	0,56 Ha	Rp 14.000.000	Rp 9.000.000
14	14	0,56 Ha	Rp 13.600.000	Rp 6.600.000
15	15	0,56 Ha	Rp 12.500.000	Rp 6.400.000

Sumber: hasil penelitian di lapangan tahun 2019

Dilihat dari data diatas maka dapat dilihat bahwa sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang terjadi di Desa Banggle kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, membawa dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat atau petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah yang kemudian di alih fungsikan menjadi lahan tebu dilihat dari segi pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 15 orang informan penggarap lahan hutan saat di wawancarai oleh peneliti. Mengeluhkan akan hal alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang dilakukan oleh pihak perum perhutani.

Hal itu dikarenakan lahan hutan yang digarap menjadi lahan sawah oleh petani penggarap di desa banggle merupakan sumber pendapatan satu-satunya bagi petani penggarap lahan yang tidak memiliki

sawah luas mauapun petani penggarap yang memiliki sawah luas. Karena petani di desa banggle tidak semuanya memiliki lahan sawah sendiri. Sehingga sebab itu dengan adanya pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah sangat menguntungkan bagi petani penggarap lahan hutan. Namun dilihat dari data tersebut 15 informan yang peneliti lakukan wawancara memberikan informasi yang hampir sama. Sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu rata-rata 15 informan memiliki lahan garapan seluas 0,56 Ha. Didukung dengan wawancara ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yaitu Bapak Poniman pada tanggal 2 Agustus 2019 menyatakan:”iya, dulu sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi sawah petani penggarap lahan hutan menerima luas garapan lahan hutan yang bisa dikelola menjadi 0,56 Ha”.

Memiliki luas Lahan garapan 0,56 Ha tersebut, petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah rata-rata menanam padi dan jagung sebelum ada alih fungsi lahan. Dari hasil wawancara dengan petani penggarap lahan hutan sebagai sawah sebelum ada alih fungsi lahan tebu. Hasil panen padi yang didapat selalu diatas 10 karung, sehingga pendapatan yang diterima selalu diatas Rp 8.000.000 pertahunnya.

Sedangkan untuk hasil panen jagung apabila dilihat dari hasil wawancara petani penggarap lahan hutan sebagai sawah selalu menerima mencapai kurang lebih mendapatkan hasil panen jagung diatas 5 kwintal sampai 1 ton, sehingga dapat dilihat ditabel bahwa pendapatan yang diterima dari hasil jagung selalu diatas Rp 5.000.000 pertahunnya sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Hasil panen padi dan jagung cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani penggarap lahan hutan sebagai sawah, dimana hasil panen tersebut digunakan untuk membayar hutang, makan sehari-hari, acara arisan dan biaya sekolah anak, terkadang digunakan sebagai modal untuk menanam padi maupun jagung. sehingga dapat dikatakan bahwa pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah membawa dampak yang baik. Berikut tabel pendapatan petani penggarap lahan hutan yang dibuka jadi sawah setelah di alihkan fungsikan menjadi lahan tebu:

Tabel 4.9 Pendapatan Informan Dalam Rupiah (Rp) setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu

No	Subjek	Luas lahan sesudah di alih fungsikan	Jumlah pendapatan hasil panen padi	jumlah pendapatan hasil panen jagung
1	1	0,44 Ha	Rp 6.400.000	Rp 4.500.000

2	2	0,22 Ha	Rp. 6.400.000	Rp 4.500.000
3	3	0,22 Ha	Rp 7.200.000	Rp 4.500.000
4	4	0,44 Ha	Rp 6.500.000	Rp 4.500.000
5	5	0,22 Ha	Rp 6.400.000	Rp 4.500.000
6	6	0,22 Ha	Rp 5.600.000	Rp 2.300.000
7	7	0,22 Ha	Rp 6.400.000	Rp 2.400.000
8	8	0,44 Ha	Rp 5.600.000	Rp 2.200.000
9	9	0,22 Ha	Rp 5.500.000	Rp 2.400.000
10	10	0,25 Ha	Rp 6.400.000	Rp 2.300.000
11	11	0,20 Ha	Rp 6.400.000	Rp 3.500.000
12	12	0,22 Ha	Rp 6.400.000	Rp 3.500.000
13	13	0,44 Ha	Rp 7.000.000	Rp 4.500.000
14	14	0,22 Ha	Rp 6.800.000	Rp 3.400.000
15	15	0,22 Ha	Rp 7.400.000	Rp 2.100.000

Sumber: hasil penelitian di lapangan tahun 2019

Dilihat dari data diatas maka dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang terjadi di Desa Banggle kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, membawa dampak yang kurang baik terhadap perekonomian masyarakat atau petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah yang kemudian di alih fungsikan menjadi lahan tebu dilihat dari segi pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 15 orang informan penggarap lahan hutan saat di wawancarai oleh peneliti. Mengeluhkan akan hal alih fungsi lahan hutan menjadi

lahan tebu yang dilakukan oleh pihak perum perhutani

Setelah adanya alih fungsi lahan hutan yang dijadikan lahan tebu dari 15 informan memberikan informasi, bahwa para petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah, sangat merasa dirugikan dimana untuk saat ini lahan yang bisa digarap menjadi lahan sawah menjadi berkurang. Rata-rata petani penggarap lahan hutan sebagai sawah hanya menerima luas lahan garapan seluas 0,24 Ha. Dengan luas garapan 0,24 Ha petani penggarap masih menanam komoditi yang sama seperti dahulu sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan sawah yaitu padi dan jagung. Dilihat dari luas garapan yang diperoleh peneliti, ketika melakukan wawancara dengan bapak Poniman selaku ketua LMDH (Lembaga masyarakat Desa Hutan). pada tanggal 2 Agustus 2019 menyatakan:”iya, sekarang lahan hutan yang dapat digarap berkurang rata-rata sekarang hanya dapat luas lahan hutan yang dapat digarap sebagai sawah seluas 0,22 Ha”. Halitu juga sama ketika peneliti melakukan observasi kelapangan memang luas garapan yang petani penggarap untuk saat ini berkurang.

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan 15 petani penggarap bahwa setelah adanya alih fungsi lahan hasil panen padi hanya mendapatkan padi kurang dari 10 karung. maka pendapatan yang diterima untuk saat ini menurun yang awalnya diatas Rp 8.000.000 setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu hanya menerima pendapatan dibawah Rp 8.000.000 pertahunnya. Dari hasil mengolah lahan hutan menjadi lahan sawah tersisa. Sehingga dapat peneliti tarik kesimpulan adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu membawa dampak yang kurang baik dari segi pendapatan petani penggarap lahan hutan. Tidak hanya dari hasil panen padi, dilihat dari hasil panen jagung juga mengalami penurunan yang awalnya rata-rata mendapat 1 ton kini setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu memperoleh hasil panen dibawah 5 kwintal.

b. Lapangan Kerja Masyarakat Desa Banggle sebelum dan sesudah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Akibat dari adanya alih fungsi lahan hutan yang menjadi lahan tebu yang terjadi di Desa Banggle Sukorame Lamongan, tidak hanya dari segi pendapatan saja dampak tersebut

dirasakan dimana dari segi lapangan kerja pasti juga akan meraskan dampaknya. Dari segi lapangan kerja, kebanyakan masyarakat desa banggle bekerja sebagai petani, entah itu petani penggarap maupun petani pemilik. Desa banggle memiliki luas lahan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 1000 Ha. Hingga akhirnya pada tahun 2004 pihak perum perhutani melakukan pembukaan lahan hutan yang bisa digarap menjadi lahan sawah seluas 200 Ha. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah disambut dengan baik oleh masyarakat desa banggle, hampir 80 orang ikut menjadi anggota penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah tersebut. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah membuka lapangan kerja bagi petani pemilik maupun petani penggarap. Hal itu karena dengan adanya pembukaan lahan hutan menjadi lahan sawah maka masyarakat desa banggle miliki lahan garapan sampingan yang bisa dikelola sendiri.

Namun pada akhir tahun 2018 pembukaan lahan hutan yang dijadikan sawah di alih fungsikan menjadi lahan tebu oleh pihak perum perhutani. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu tersebut membawa dampak baik dan tidak baik dari segi lapangan kerja petani

penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah. Berikut penjabaran tabel dari hasil wawancara peneliti dengan petani penggarap mengenai lapangan kerja yang terjadi sesudah alih fungsi lahan hutan dan sebelum alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Tabel 4.10 Lapangan kerja sebelum dan setelah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu

No	Subjek	Lapangan Kerja	
		Sebelum	Sesudah
1	1	petani pemilik	petani pemilik
2	2	petani pemilik	petani
3	3	petani	petani
4	4	petani	berdagang
5	5	petani	buruh tebu
6	6	petani	petani
7	7	buruh tani	kuli bangunan
8	8	buruh tani	buruh tebu
9	9	buruh tani	buruh tebu
10	10	buruh tani	buruh tebu
11	11	buruh tani	Berdagang
12	12	buruh tani	ternak kambing
13	13	buruh tani	petani
14	14	petani	petani
15	15	petani	tukang

Sumber: hasil penelitian di lapangan tahun 2019

Dilihat dari data diatas maka dapat dilihat bahwa adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang terjadi di desa Banggle, mebuat perubahan mata pencaharian dari beberapa petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah. ketikadilakukan wawancara, dan penelitian secara langsung dari adanya pembukaan lapangan kerja. Dari tabel data diatas dan dari hasil wawancara dengan petani

penggarap lahan bahwa, petani yang memiliki lahan sawah milik sendiri yang luas maka petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah tidak akan merubah mata pencaharian nya sebagai petani walaupun ada alih fungsi lahan hutan sabagai lahan tebu.

Sehingga ada 3 informan yaitu bapak mulyo, bapak danuri dan bapak sono akan menjadi petani pemilik di lahan sawah milik sendiri dan menajadi petani di lahan hutan sebagai lahan sawah. Dan ketika ada alih fungsilahan ketiga informan tersebut tidak merasa terganggu ketika ditanya lapangan kerja. Karena mereka masih bisa bekerja dilahan sawah asli milik sendiri.

Sedangkan bagi penggarap lahan hutan yang tidak memiliki lahan sawah tidak luas atau sama sekali tidak memiliki sawah, dengan adanya alih fungsi lahan tersebut membawa dampak yang cukup baik. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara dengan informan 9 yang mengatakan bahwa “ meskipun alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu dan lahan yang saya garap jadi sawah menyempit tapi saya merasa terbantu dengan adanya alih fungsi lahan hutan tersebut karena saya bisa bekerja di lahan tebu tersebut.”

Dimana mekipun lahan hutan yang mereka garap berkurang tapi mereka bisa bekerja menjadi buruh di lahan tebu tersebut. Dengan arti alih fungsi lahan hutan menjadi tebu membawa dampak yang baik bagi penggarap lahan yang tidak memiliki lahan sawah milik sendiri, karena mereka bisa bekerja di lahan tebu tersebut. Akan tetapi tidak semua informan bekerja dilahan tebu terseut hanya 5 petani penggarap lahan hutan sebagai sawah yaitu bapak Jamianto, bapak Karmisan, bapak Sayik, bapak salam dan bapak Purnawi. Selain itu penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah yang tidak memiliki lahan sawah sendiri, ada yang tetap setia menjadi petani dan tidak bekerja sebagai buruh tebu. Karena lahan hutan yang dijadikan sawah merupakan tempat satu-satu nya mempertahankan hidupnya.

Selain terbuka nya lapangan kerja bagi penggarap yang tidak memiliki lahan sawah sendiri. Berbeda dengan informan yang lain dimana informan lain lebih suka mencari pekerjaan lain seperti berdagang, usaha jual bawang merah, berternak kambing, kuli bangunan dan tukang. Dengan mencari pekerjaan lain maka menjadi petani, lahan hutan yang bisa digarap menjadi sawah hanya dibuat sebagai kerja sampingan ketika masa panen padi dan panen jagung tiba.

Sehingga dapat dikatakan sebelum adanya alih fungsi lahan hutan sebagai lahan tebu mayoritas petani penggarap lahan hutan sebagai sawah hanya memiliki mata pencaharian sebagai petani baik petani pemilik maupun petani penggarap. Namun setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu membawa dampak dimana mata pencaharian yang mulai beragam karena lahan hutan yang dapat digarap sebagai lahan sawah berkurang sehingga petani penggarap lahan hutan ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, buka toko sembako, buka usaha jaul beli bawnag merah, peternak kambing, tukang dan ada yang bekerja dilahan tebu.

Dari pengamatan peneliti adanya alih fungsi lahan hutan sebagai lahan tebu tidak mampu menyerap tenaga kerja dari petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah karena dari petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah hanya 5 petani yang mau bekerja sebagai buruh tebu. Sednagkan kebnyakan pekerja laha tebu tersebut orang yang berasal dari luar desa banggle atau bukan petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah.

c. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Banggle sebelum dan sesudah alih

fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Akibat dari adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang dikuasai oleh PT kebun Tebu Mas terhadap perekonomian masyarakat Desa Banggle yang ikut menjadi penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah. Perekonomian yang dilihat dalam penelitian ini adalah pendapatan, lapangan kerja, dan sosial ekonomi. Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, tidak semua petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah di desa Banggle mengerti apa arti penting nya sebuah pendidikan bagi anak-anak mereka.

Di lihat dari hasil wawancara dengan petani penggarap dapat dilihat bahwa kebanyakan dari mereka hanya lah berpendidikan sampai jenjang SD atau SMP. Hanya terdapat 3 informan atau petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah yang berpendidikan SMA. Bagi informan yang berpendidikan SMA bagi mereka banyak atau tidaknya tanggungan keluarga dan pengeluaran untuk konsumsi tidak menyurutkan niat mereka untuk menyekolahkan anak nya sampai perguruan

tinggi. Karena bagi mereka pendidikan adalah hal yang paling penting. Sehingga dengan demikian kondisi sosial ekonomi penggarap lahan hutan yang mampu sampai SMA tidak terpengaruh setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu. Hal itu dapat dilihat bahwa hasil panen atau lahan garapan petani penggarap tersebut tidak hanya dari lahan hutan itu saja, karena mereka mempunyai luas garapan sendiri yang cukup untuk membiaya anaknya sampai perguruan tinggi. Sehingga kondisi sosial ekonomi setelah dan sesudah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu tetap lah sama seperti dulu.

Namun bagi informan yang hanya mampu menyekolahkan anak nya sampai bangku SMP hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bagi mereka pendidikan adalah nomer sekian karena bagi mereka yang hanya lulusan SMP makan dan kebutuhan lain nya adalah kebutuhan yang harus diutamakan. Apalagi setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu bagi petani yang tidak memiliki sawah sendiri akan berpengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi petani penggarap lahan. Dimana tunjangan keluarga yang banyak sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tidak tercukupi akibat alih fungsi lahan hutan tersebut. bagi petani

penggarap, lahan hutan yang dibuka menjadi sawah sangat penting bagi kelangsung hidup para petani penggarap lahan hutan. Karena dari situ lah sumber utama mereka memenuhi kebutuhan dan menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Sedangkan dari 15 informan mengatakan kondisi sosial ekonomi setelah dan sesudah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu, mengenai kesehatan belum diperhatikan, karena apabila memang ada salah satu anggota penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah yang masuk rumah sakit, maka mereka akan menjual barang berharga yang dirumah dan menghutang ke orang lain. Karena mereka tidak pernah berfikir untuk tabungan kesehatan. Selain itu dari hasil wawancara bahwa rata-rata informan yang menjadi petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah, hanya sedikit yang memiliki lahan atas kepemilikannya sendiri dari warisan orang tua.

Dari hasil observasi peneliti melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah dan sebelum adanya alih fungsi lahan sosial ekonominya masih sama seperti dulu. Karena disini petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah dikategorikan menjadi 2. Pertama bagi

informan atau petani lahan hutan yang memiliki lahan sawah sendiri keadaan sosial ekonominya setelah dan sesudah alih fungsi lahan tidak akan berpengaruh karena petani penggarap masih bisa memenuhi kebutuhan dan lainnya dari lahan sawah sendiri dan dapat tambahn dari lahan hutan yang dibuka menjadi lahan sawah.

Sedangkan yang kedua bagi petani penggarap lahan hutan menjadi sawah yang tidak memiliki lahan sawah sendiri setelah adanya alih fungsi sosial ekonominya berubah atau berbeda sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu. Sebelumnya semua kebutuhan terpenuhi karena kepelikan lahan hutan yang dapat digarap luas sedangkan setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu harus dibatasi untuk memenuhi kebutuhan karena berkurangnya luas garapan. Selain itu mereka hanya mementingkan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memikirkan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didukung oleh wawancara dengan kepala desa bahwa masyarakat desa banggle anaknya hanya disekolahkan sampai bangku SMP dan masalah kesehatan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu yang terjadi di desa banggle membawa dampak diantaranya:

1. Dilihat dari segi pendapatan petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah yang kemudian di alihkan menjadi lahan tebu membawa dampak yang kurang baik. Lahan yang dapat digarap menjadi berkurang maka pendapatan sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu mengalami perubahan. Dari luas lahan garapan yang awalnya petani lahan hutan mendapatkan lahan yang dapat digarap menjadi lahan sawah rata-rata seluas 0,56 Ha, setelah adanya alih fungsi lahan hutan sebagai lahan tebu lahan menjadi berkurang dan rata-rata hanya dapat bagain lahan hutan 0,22 Ha. Dilihat dari luas garapan yang awalnya luas dan sekarang berkurang sehingga berpengaruh pada hasil panen padi maupun panen jagung. Sebelum adanya alih fungsi lahan hasil panen padi dan jagung petani penggarap lahan hutan menghasilkan 1 ton keatas dan menerima pendapatan diatas Rp 8.000.000 pertahunnya. Namun setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu hasil panen padi dan

jagung petani penggarap kurang dari 1 ton dan menerima pendapatan dibawah Rp 10.000.000 pertahunnya.

2. Dilihat dari segi lapangan kerja, sebelum adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu pekerjaan petani penggarap mayoritas sebagai petani baik petani pemilik maupun petani penggarap. Akan tetapi setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu, hanya ada 5 petani penggarap lahan hutan yang bekerja sebagai pekebun tebu. Sedangkan 3 petani penggarap lahan hutan yang awalnya dijadikan sawah tetap mempertahankan profesinya sebagai petani. Karena selain dari lahan hutan ke 3 petani tersebut bisa berkerja di lahan sawah milik sendiri, sehingga tetaplah terbuka lapangan kerja. Sedangkan untuk penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah yang lainnya menciptakan pekerjaan atau mata pencaharian baru seperti beternak kambing, tukang, kuli bangunan, buka toko sembako, usaha jual beli bawang merah dan sebagai buruh tani.
3. Apabila dilihat dari sosial ekonomi, ada dua kategori petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah. Kategori yang pertama adalah petani penggarap lahan hutan sebagai sawah, akan tetapi petani penggarap lahan hutan tersebut memiliki

lahan sawah yang kepemilikannya lahan sawah milik sendiri atau warisan orang tua. Sehingga dengan demikian kondisi sosial ekonomi petani penggarap lahan hutan sebelum dan sesudah ada alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu tidak mengalami perubahan yaitu sama sebelum alih fungsi lahan. Karena semua kebutuhannya masih bisa dicukupi baik pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Kategori yang ke dua adalah petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah, akan tetapi tidak memiliki lahan sawah yang kepemilikannya milik sendiri. Sehingga kondisi sosial ekonominya berbeda sebelumnya ada alih fungsi baik dan setelah adanya alih fungsi lahan kurang baik, baik itu dilihat dari pemenuhan akan kebutuhan pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan adanya pelaksanaan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu di desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yaitu:

1. Pihak perum perhutani sebaiknya memberikan sosialisasi langsung melalui

petani penggarap lahan hutan maupun ketua LMDH (Lembga Masyarakat Desa Hutan) agar bisa menyakinkan petani penggarap lahan hutan menjadi sawah terkait dengan penetapan sharing atau pajak tentang pembayaran iuran lahan hutan sehingga petani penggarap lahan hutan bisa membayar sesuai dengan apa yang diharap pihak perum perhutani. Selain sosialisasi langsung pihak perum perhutani juga melakukan pendekatan personal kepada petani penggarap lahan hutan menjadi lahan sawah sehingga akan terjalin komunikasi yang baik dengan petani penggarap lahan hutan sebagai lahan sawah agar tidak ada kesalah pahaman.

2. Ketua organisasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) bersama perangkat desa Banggle sebaiknya segera menanggapi keluhan petani penggarap setelah adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu, misal dengan cara memberikan sebuah kegiatan atau membuka lapangan kerja yang berupa memperkerjakan petani penggarap lahan hutan menjadi sawah di lahan tebu dengan imbalan gaji yang lumayan besar, agar petani penggarap tertarik bekerja dilahan tebu tersebut sehingga, pendapatannya

bisa meningkat sehingga kondisi sosial ekonominya berkembang.

3. Kepada petani penggarap yang mendapat lahan garapan diharapkan dapat menjadi lebih kreatif dalam mengelolah hasil pertanian dalam penggarapan lahan hutan menjadi sawah walaupun lahan hutan yang digarap menjadi sawah berkurang, misalnya dengan cara mengelolah hasil panen jagung, tidak hanya dijual secara mentah akan tetapi hasil panen jagung bisa dijual dalam bentuk seperti bronis jagung, tepung jagung, dan dalam bentuk lain yang mempunyai nilai jual lebih mahal dari penjualan jagung mentah. Selain itu petani penggarap tidak harus menanami lahan hutan itu hanya pada tanaman jagung atau padi akan tetapi bisa ditanami dengan tanaman lain yang mungkin nilai jualnya lbisa lebih tinggi dari kagung dan padi misalnya kedelai, buah-buah dan tebakau. sehingga hal tersebut akan menambah pendapatan, lapangan kerja dan sosial ekonomi petani penggarap lahan hutan bisa terangkat meskipun adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tebu.

Daftar Pustaka

Hidayani,Dina dan Kartikasari Dwi .(2016).
Analisis Kesempatan Kerja Yang

Dibutuhkan dalam Perekrutan Karyawan di Batam yang Menggunakan Iklan Lowongan Pekerjaan di Media Koran Batam Pos dan Tribun Batam . Skripsi Batam: Diterbitkan oleh Prodi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Batam (Online), ([https://www.researchgate.net/publication/323004643 Analisis Kesempatan Kerja Yang Dibutuhkan dalam Perekrutan Karyawan di Batam yang Menggunakan Iklan Lowongan Pekerjaan di Media Koran Batam Pos dan Tribun Batam](https://www.researchgate.net/publication/323004643_Analisis_Kesempatan_Kerja_Yang_Dibutuhkan_dalam_Perekrutan_Karyawan_di_Batam_yang_Menggunakan_Iklan_Lowongan_Pekerjaan_di_Media_Koran_Batam_Pos_dan_Tribun_Batam)). Diunduh 25 Maret 2019.

Kamilah, Ahya .(2012). Analisis Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bekasi (Kasus Kecamatan Bekasi Utara Dan Bantar Gebang). Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unisma Bekasi (Online), (<http://eprints.umm.ac.id/35252/1/jiptummpp-gdl-diadwitris-48486-1-pendahul-n.pdf>). Di akses 05 juni 2019.

Kristianto, Eggy. (2015). Kajian Konversi Sawah Menjadi Non Sawah Di Kabupaten Pati Tahun 2003 – 2013. Skripsi Semarang: Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Semarang (Online), (<https://lib.unnes.ac.id/23284/1/3211409021.pdf>). Diunduh 25 Maret 2019 .

Laksana, Rifal .(2015). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kemandirian Pangan Di Kabupaten Subang (Studi Kasus: Desa Belendung, Kecamatan Cibogo). Skripsi Bogor: Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (online), (<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/76922/1/H15rla.pdf>) Diunduh 27 Maret 2019.

Lumintang, Fatmawati M .(2013). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. Skripsi Manado: Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/1719-ID-analisis-pendapatan-petani-padi-di-desa-teep-kecamatan-langowan-timur.pdf>). Diunduh 25 Maret 2019

Ningsih, Rianty.(2018). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Status Pekerjaan Dan Pendapatan Petani Di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Lampung: diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung (Online), (<http://repository.radenintan.ac.id/5415/1/SKRIPSI.pdf>). Diunduh 26 Mei 2019.

Sulistyawati, Devi Aryani. (2014). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur (Studi Kasus : Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu). Skripsi Bogor: Diterbitkan oleh Falkutas Ekonomi dan Manjemen Institut Bogor,(Online),(<https://repository.iib.ac.id/bitstream/handle/123456789/72210/H14das.pdf?sequence=1&isAllowed=y>). Diunduh 28 April 2019.

Wijaya, Saputra I Gede dan Made Kembar Sri Budhi.(2015). Studi Alih Fungsi Lahan DanDampaknya Terhadap

Sosial Ekonomi Petani Jambu Mete Di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Skripsi Bali: Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali (online)

(<https://media.neliti.com/media/publications/44746-ID-studi-alih-fungsi-lahan-dan-dampaknya-terhadap-sosial-ekonomi-petani-jambu-mete.pdf>)